

Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

KOMUNIKASI POLITIK ANTAR KOALISI PARLEMEN DI DPR RI

Oleh: Dani Fadillah, M.A. dan M. Najih Farihanto, M.A.

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta
E-mail: danifadillah@uad.ac.id dan najiholic@gmail.com)

Abstrak

Politik adalah sesuatu yang sangat dinamis, sehingga ada premis yang menyatakan tak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik, begitu pun dalam dunia perpolitikan yang terjadi di Indonesia. Pasca terjadinya peralihan kepemimpinan negara setelah pemilu 2014 kemarin kutub perpolitikan nasional di parlemen terpisah menjadi dua; Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP), dimana yang satu merupakan kubu pendukung pemerintah dan yang lain adalah kubu penyeimbang. Akan tetapi politik tetaplah politik dimana banyak terjadi komunikasi dan konsolidasi di dalamnya, perbedaan ijihad politik tidak serta merta dapat dijadikan patokan bahwa mereka tidak ada komunikasi antar partai atau antar tokoh yang berbeda jalur koalisinya, bahkan tidak menutup kemungkinan dalam internal koalisi pun ada komunikasi-komunikasi khusus yang dilakukan oleh salah satu anggota koalisi dengan koalisi lainnya. Untuk itu lah penelitian ini kami coba untuk melaksanakan gunan mengetahui praktik komunikasi politik yang berjalan antar organisasi (fraksi) dalam gedung parlemen DPR RI

Kata kunci: Komunikasi Politik, Komunikasi Organisasi, DPR RI.

Abstract

Politics is something that is very dynamic, so there is a premise that says there is no eternal friends and enemies in politics, nor in the world of politics that occurred in Indonesia. Post a shift away from state management after the 2014 elections yesterday poles of national politics in parliament split into two; Indonesian Coalition Deal (KIH) and Red and White Coalition (NMC), which are a stronghold perupakan government and the other is the stronghold of a counterweight.

But politics is still politics where there have been communication and consolidation in it, a difference of ijihad politics can not automatically be used as a benchmark that they no communication between the parties or between characters of different paths coalition, even did not rule in the internal coalition there is any communications Special performed by one of the coalition with the other coalition members. For it was this study we try to execute gunan knowing of political communication that runs between organizations (fractions) in parliament House of Representatives.

Keywords: Political Communication, Organizational Communication, DPRRI.

A. Pendahuluan

Dalam Kajian keilmuan sinergi antara komunikasi dan politik, atau yang biasa disebut dengan komunikasi politik kian hari menjadi kajian yang menarik. Sebagai sebuah disiplin ilmu komunikasi politik memang masih tergolong baru, namun sesungguhnya penelaahan komunikasi dan politik, serta pemanfaatan komunikasi untuk kepentingan politik telah berlangsung sangat lama (Dan Nimmo, 2000: vii). Kajian komunikasi politik

menurut Nina W. Syam (2001: 2) berada dalam satu pohon komunikasi, komunikasi politik adalah salah satu cabang komunikasi organisasional berdasarkan pendekatan publik.

Seperti yang diketengahkan oleh Mueller (1973: 73) bahwa komunikasi politik didefinisikan sebagai hasil yang bersifat politik apa bila menekannya pada hasil. Disisi lain bagi mereka yang lebih menekankan fungsi komunikasi politik dalam sistem politik, komunikasi politik didefinisikan sebagai komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Saat ini secara kasat mata peta perpolitikan parlemen kita ter agi menjadi dua mata angin, yaitu partai-partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan partai-partai oposisi yang tergabung Koalisi Merah Putih (KMP). Ada beberapa pihak yang menyayangkan kenapa harus ada pembagian koalisi seperti ini dalam negara kita, adanya pembagian koalisi seperti ini seolah memperlihatkan para wakil rakyat tidak dapat kompak dan tidak dapat menjalin komunikasi yang baik antar sesama wakil rakyat.

Namun tanggapan seperti itu terlalu polos untuk menerjemahkan situasi politik. DPR bukanlah sebuah institusi sosial melainkan sebuah institusi politik yang sudah barangpasti sifatnya sangat politis. Perbedaan warna dan ideologi partai dapat dikatakan tidak akan menghalangi komuniaksi antar aktor politik yang menginginkan sebuah posisi atau situasi tertentu. Singkat kata transaksi politik ada lah hal yang lumrah terjadi dalam gedung parlemen, tidak ada kawan mau pun lawan yang abadi.

Selain itu beberapai ilmuwan juga melihat komunikasi politik sebagai suatu pendekatan dalam pembangunan politik. Karena itu komunikasi politik dianggap memiliki sesuatu yang istimewa, komunikasi politik meletakkan basis untuk menganalisis masalah yang muncul dan berkembang dalam keseluruhan proses dan perubahan politik suatu bangsa. Plano (1982: 24) melihat bahwa komunikasi politik merupakan proses penyebaran arti, makna, atau pesan yang bersangkutan dengan suatu sistem politik. Oleh marena itulah kita tidak perlu heran ketika melihat ada sebuah isu yang seharusnya mendapat penolakan dari partai oposisi namun malah mendapat dukungan, begitu pula sebaliknya, ketika seharusnya ada sebuah isu yang mendapat dukunga dari partai pendukung pemerintah namun justru mendapat penolakan.

Hal-hal yang seperti itu membuktikan komunikasi politik adalah dampak atau hasil yang bersifat politis, disamping sebagai salah satu fungsi yang menjadi syarat berfungsinya sistem politik. Jika komunikasi politik dilihat sebagai jembatan metodologis antara disiplin komunikasi dan politik, maka obyek formal komunikasi politik juga adalah proses penciptaan kebersamaan dalam makna tentang fakta dan peristiwa politik. Singkat kata, hal-hal yang bersifat transaksional lumrah terjadi meski memiliki para aktor politik berada dalam barisan kekuatan politik yang berbeda.

B. Komunikasi Politik

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya bahwa dalam komunikasi hal yang terpenting selain komunikator adalah pesan. Suatu pesan ditransformasikan pada titik-titik penyandian dan pengalihan sandi sehingga pesan merupakan pikiran dan ide pada suatu tempat pada system jaringan syaraf dari sumber atau penerima setelah penyandian terjadi dalam suatu situasi tatap muka atau pun melalui perantara media.

Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Menurut Colin Cherry (dalam Fisher, 1986: 365), suatu pesan mungkin, merupakan pikiran, namun pikiran ini tidak disampaikan secara fisik. Akan tetapi, seandainya bentuk fisik dari pesan ini disandi, maka berubah menjadi pikiran kembali, itulah yang menyebabkannya menjadi pesan. Penegasan perbedaan antara pesan dan isyarat diungkapkan juga oleh Clevenger dan Matthews (dalam Fisher, 1986: 365). Ia membedakan antara pesan dan isyarat atas dasar bentuk fisik dan lokasinya pada saluran. Isyarat atau signal adalah peristiwa fisiknya, dan pesan hanya terdapat pada saluran di dalam diri sumber atau penerima. Dalam setiap peristiwa komunikasi terdapat tiga buah pesan yang potensial, yakni pesan yang dikirimkan, yang diterima, dan yang terjadi dalam diri pengamat situasi komunikatif itu.

Effendy (2001: 11) lebih menjelaskan maksud pesan berbentuk pikiran dapat berupa gagasan, informasi, opini, perasaan, dan lain-lain yang muncul di dalam pikiran komunikator. Perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keragu-raguan, kekhawatiran, kemarahan, keberanian, dan lain-lain yang timbul di lubuk hati dan pikiran komunikator.

Dalam proses komunikasi politik pun, pesan politik merupakan komponen terpenting. Mengacu pada definisi komunikasi politik secara umum, pesan politik itu adalah pesan yang dibawa oleh komunikator politik, baik dalam bentuk gagasan, pikiran, ide, perasaan, sikap, maupun perilaku tentang politik yang memengaruhi komunikasi politik. Pada dasarnya, menurut Rochajat Harun dan Sumarno (2006: 12), isi pesan komunikasi politik akan terdiri dari:

1. Seperangkat norma yang mengatur lalu lintas transformasi pesan-pesan.
2. Panduan dan nilai-nilai idealis yang tertuju pada upaya mempertahankan serta melestarikan system nilai yang sedang berlangsung.
3. Sejumlah metode dan cara pendekatan untuk mewujudkan sifat-sifat integratif bagi penghuni system.
4. Karakteristik yang menunjukkan identitas bangsa. Motivasi sebagai dorongan dasar yang memicu pada upaya meningkatkan kualitas hidup bangsa.

Graber (1984: 138) memandang pesan komunikasi politik dalam perspektif yang sangat luas. Menurutnya, pesam komunikasi politik dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan, struktur, dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan politik. Bahkan, Muhtadi (2008: 11) menegaskan bahwa pesan komunikasi politik itu adalah seluruh budaya politik yang berkembang di suatu negara.

Dan untuk memuluskan proses penyampaian pesan tersebut maka perlu adanya beberapa bentuk dari intensif pesan. Bersandar pada pendapat Davis V. J. Bell, ada tiga jenis intensif pesan dalam sebuah pesan politik, yaitu: intensif kekuasaan, pembicaraan pengaruh, dan pembicaraan otoritas (Dan Nimmo, 1993: 75).

Adapun dalam penjelasannya lebih jauh, intensif dalam isi pesan politik dapat dijabarkan sebagai berikut:

5. Intensif kekuasaan mempengaruhi orang lain dengan ancaman atau janji. Kunci intensif kekuasaan ialah bahwa seseorang mempunyai cukup kemampuan untuk mendukung janji maupun ancaman, dan orang lain mengira bahwa pemilik kekuasaan itu akan melakukannya. Jadi, janji, ancaman, penyuaipan dan pemerasan adalah alat tukar pada komunikasi kekuasaan berdasarkan pada kemampuan memanipulasi sanksi positif atau negatif.
6. Pembicaraan pengaruh tanpa sanksi-sanksi seperti tersebut di atas. Memberi pengaruh (karena prestise atau reputasinya) dengan berhasil memanipulasikan

persepsi atau pengharapan orang lain terhadap kemungkinan mendapat untung atau rugi. Pada komunikasi pengaruh alat tukar komunikasinya ialah nasihat, dorongan, permintaan dan peringatan.

7. Pembicaraan otoritas adalah pemberian perintah. Yang dianggap sebagai penguasa yang sah adalah suara otoritas dan memiliki hak untuk dipengaruhi. Sumber pengesahan sama dengan sumber otoritas, yaitu antara lain : keyakinan religius, sifat-sifat supranatural, daya tarik pribadi, adat, kebiasaan, dan kedudukan resmi

Bila digambarkan maka Isi dari pesan politik sebagai berikut:

Kategori Pesan	Rumusan Insentiff Pesan	Kandungan Isi Pesan
Kekuasan	Jika Anda melakukan X, maka saya akan melakukan Y.	Janji, ancaman, suap, pemerasan
Pengaruh	Jika Anda melakukan X, maka Anda akan (merasakan, mengalami) Y.	Nasihat, dorongan, permintaan, peringatan
Otoritas	Lakukan X. Dilarang melakukan X.	Paksaan

Tabel 1 Isi Pesan Politik

C. Perspektif Komunikasi Politik

Secara filosofis, kajian komunikasi politik adalah kajian tentang hakikat kehidupan manusia untuk mempertahankan hidup dalam lingkup berbangsa dan bernegara. Kajian komunikasi politik bersifat dimensional dan kasuistik karena berkaitan dengan berbagai macam problem dan kompleksitas permasalahan. Tidak hanya berkisar pada pembahasan proses komunikasi yang memuat pesan-pesan politik, tetapi juga membahas bagaimana komunikasi dapat berlangsung dalam suatu sistem politik atau sistem pemerintahan yang mencakup bahasan-bahasan bagaimana sistem itu dapat dipertahankan dan dapat berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pada hakekatnya komunikasi politik mengandung informasi atau pesan tentang politik. Dan Nimmo (1999) juga memberikan formulasi komunikasi politik dengan memandang inti komunikasi sebagai proses interaksi sosial dan inti politik sebagai konflik sosial, Nimmo merumuskan bahwa komunikasi politik sebagai kegiatan yang bersifat politis atas dasar konsekuensi aktual dan potensial yang menata perilaku dalam kondisi konflik.

Pendekatan konseptual ini, semakin meyakinkan bahwa proses pemilihan pimpinan DPR RI merupakan bidang kajian masalah komunikasi politik. Kegiatan maupun

Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

perilaku komunikator politik menghasilkan pesan politik yang diliput dan diberitakan media massa kemudian direspons oleh masyarakat sebagai komunikasi politik. Masalahnya, apakah keseluruhan proses kegiatan pemilihan pimpinan DPR RI dapat dikatakan merupakan implementasi komunikasi politik yang efektif yang tujuan akhirnya adalah menata perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu mendekatkan realita proses kegiatan pemilihan pimpinan DPR RI kepada praktek komunikasi politik yang menurut Fisher (1990: 139-320) pada hakikatnya mengenal 4 (empat) paradigma yaitu paradigma mekanistik, paradigma psikologis, paradigma interaksional, dan paradigma pragmatis. Secara ideal praktek komunikasi politik menjalankan paradigma interaksional.

Paradigma interaksional menyatakan bahwa komunikasi dikonseptualisasikan sebagai interaksi manusiawi pada masing-masing individu yang berkomunikasi. Interaksi ini sering disamakan dengan bentuk komunikasi dua arah antara komunikator dengan komunikasi yang dibangun secara manusiawi. Itu artinya, kegiatan komunikasi politik melalui paradigma interaksional ini paling tepat bila digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan wewenang Dewan yang wajib melakukan komunikasi dua arah dalam kerangka representasi rakyat.

Sedangkan paradigma pragmatis memusatkan perhatian pada pragmatika atau tindakan. Tindakan tersebut dapat berupa ucapan, tindakan atau perilaku. Pada paradigma pragmatis orientasi ditujukan kepada perilaku komunikator saja dalam suatu sistem sosial. Tindakan atau perilaku komunikator merupakan bentuk komunikasi dan inilah yang terjadi pada praktik komunikasi politik pemilihan pimpinan DPR RI.

Perdebatan politik yang dilakukan komunikator politik (anggota DPR RI) yang terjadi pada Rapat Paripurna dan disajikan lewat media massa, berlangsung kurang baik sehingga menimbulkan pemberitaan dan respons negatif di media massa. Pada sisi yang lain, komunikasi politik sayangnya tidak dapat memberikan umpan balik atas pesan politik yang disampaikan komunikator politik dan diberitakan melalui media massa tersebut. Kondisi itu disebabkan kegiatan pemilihan pimpinan DPR RI memang tidak memberikan kesempatan kepada komunikasi berupa mekanisme penerimaan umpan balik.

Ini pula yang menyebabkan umpan balik komunikasi politik, bunyi pesan politik lebih mengarah kepada kritikan, sindiran, kekecewaan, meskipun ada juga berisi kekhawatiran. Sedangkan saluran komunikasi yang digunakan terbatas hanya menggunakan media massa dan atau media sosial. Komunikasi politik yang dibangun dari kegiatan pemilihan pimpinan DPR RI menjadi bentuk komunikasi satu arah, karena interaksi komunikator politik dengan komunikasi politik terjadi melalui saluran komunikasi yang berbeda dengan sudut pandang pesan politik yang berbeda pula.

Kondisi ini berpotensi menyebabkan terbentuknya persepsi negatif dari masyarakat terhadap keseluruhan kegiatan proses pemilihan pimpinan DPR RI. Citra politik DPR RI baik secara kelembagaan maupun anggota DPR RI menjadi semakin menurun karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI sebagai lembaga perwakilan. Perlu upaya yang sistematis untuk membangun kembali citra politik DPR RI.

D. Komunikasi dan Citra Politik

Tujuan komunikasi politik adalah membentuk citra politik yang baik bagi komunikasi. Citra politik terbentuk berdasarkan informasi yang diterima komunikasi, baik langsung maupun melalui media politik, termasuk interaksi melalui media sosial. Citra politik tersusun melalui persepsi komunikasi yang bermakna tentang pesan politik (kegiatan dan tokoh) dan kemudian menyatakan makna itu melalui kepercayaan, nilai, dan pengharapan dalam bentuk pendapat pribadi yang selanjutnya dapat berkembang menjadi pendapat umum.

Untuk itu menjadi penting diingat bahwa pada hakikatnya suatu strategi dalam komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan politik pada masa depan. Justru itu, merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan politik akan merupakan keputusan yang paling tepat bagi komunikator politik untuk membangun citra politik sebagai tujuan politik di masa depan.

Citra adalah kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan. Pemahaman itu sendiri muncul karena adanya informasi. Tugas DPR RI pada masa selanjutnya adalah membangun dan atau menegakkan citra kelembagaan perwakilan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan tidak melahirkan isu-isu yang dapat merugikan.

Tetap konsisten untuk menerapkan paradigma interaksional pada kegiatan komunikasi politik dengan cara mengembangkan komunikasi dua arah oleh DPR RI kepada seluruh masyarakat, merupakan pilihan yang paling tepat. Komunikasi dua arah harus selalu digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan wewenang Dewan dalam kerangka representasi rakyat.

Seberapa jauh citra akan terbentuk sepenuhnya ditentukan oleh bagaimana DPR RI mampu membangun persepsi yang didasarkan realitas yang terjadi (Persepsi-Realitas-Citra/PRC). Apalagi kalau realitas diselewengkan untuk mengelabui target audience sehingga memunculkan persepsi sesuai dengan apa yang kita inginkan. PRC dibangun dengan fondasi kredibilitas. PRC yang tidak didasari informasi realitas dengan kredibilitas tinggi hanya akan menghasilkan citra yang lemah. Risiko yang diakibatkan oleh informasi yang tidak kredibel adalah banyak celah yang bisa dilihat oleh publik, termasuk pihak lain yang memiliki kepentingan berseberangan, untuk dengan mudah mengubah citra menjadi negatif. Citra DPR RI yang positif mengandung arti kredibilitas Dewan di mata publik adalah baik (*credible*), mencakup kemampuan (*expertise*) DPR RI melaksanakan kinerjanya dan kepercayaan (*trustworthy*) publik terhadap DPR RI.

Proses pemilihan pimpinan DPR RI masuk dalam kajian masalah komunikasi politik. Kegiatan dan perilaku komunikator politik adalah pesan politik yang kemudian disebarluaskan oleh media massa. Namun sayangnya masyarakat sebagai komunikasi politik tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan umpan baliknya, karena tidak tersedia mekanisme untuk itu. Umpan baliknya disalurkan melalui media massa dan interaksi melalui media sosial, sehingga bunyi pesan umpan baliknya lebih banyak berupa kritikan, sindiran, kekecewaan meskipun ada juga kekaguman.

1. Manuver dalam Komunikasi Politik

Manuver politik yang dilakukan oleh Koalisi Merah Putih (KMP) yang diusung oleh Partai Gerindra, Golkar, PKS, PAN dan PPP dalam ‘mengimbangi’ Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari PDIP, Nasdem, PKB dan Hanura seolah menyajikan tontonan drama yang tidak ada akhirnya. Masih segar dalam ingatan kita ketika kubu KMP mengajukan gugatan Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK) menyusul pengumuman hasil Pilpres yang dimenangi oleh Ir. H. Joko Widodo dari kubu KIH. Kontan saja aksi ini menimbulkan gejolak politik yang disertai oleh riak-riak ketegangan, menyusul aksi demonstrasi massa yang terjadi di Gedung MK.

Walaupun gugatan tersebut ditolak, namun kubu KMP seolah tidak ingin menyerah begitu saja. Bermodalkan keunggulan perolehan kursi di parlemen, kubu KMP terus bergerak menyusun strategi yang dengan jelas terbaca sebagai upaya ‘menekan’ kubu KIH. Yang paling kita tentu ingat tentunya terpilihnya paket Pimpinan DPR yang semuanya berasal dari kubu KMP plus satu orang wakil ketua dari Partai Demokrat.

Lepas dari ambiguitas Partai Demokrat dalam drama politik di DPR tersebut, rakyat sungguh dibingungkan dengan manuver-manuver yang terlihat penuh intrik dan bahkan terkesan licik tersebut. Sementara itu, kubu KIH seolah memberikan perlawanan dengan aksi menggalang massa untuk menggugat RUU Pilkada ke MK yang dilakukan baik melalui media sosial maupun media lainnya. Untuk menjustifikasi aksi ini, kubu KIH melemparkan isu perampasan hak politik rakyat, kematian demokrasi di Indonesia dan sebagainya.

Aksi ini berhasil menggalang dukungan sebagian masyarakat, khususnya para *netizen* menyusul maraknya kecaman bahkan hujatan yang ditujukan pada Presiden SBY lantaran memerintahkan Partai Demokrat untuk *Walk Out* (WO) pada saat Sidang Paripurna. Akibatnya, kubu KIH kalah telak dalam voting tentang pengesahan RUU Pilkada.

Uniknya, pada pemilihan Pimpinan DPR, gantian kubu KIH yang melakukan aksi WO. Hal ini tentu saja memuluskan skenario yang telah dirancang oleh kubu KMP sehingga secara aklamasi Pimpinan DPR yang didominasi oleh kubu KMP pun terpilih. Aksi WO kubu KIH ini mengakibatkan aroma perseteruan antara kubu KMP dan kubu KIH makin meningkat. Dengan kata lain, aksi saling menggugat, saling membalas WO dan sebagainya seolah mewarnai kehidupan berdemokrasi di kalangan elit politik negeri ini.

2. Membidik Kekuasaan

Jika kita perhatikan dengan seksama substansi yang diperjuangkan oleh para elit politik tersebut adalah kekuasaan. Kubu KMP menggugat hasil Pilpres karena ingin mendapatkan kekuasaan eksekutif (Presiden), sementara kubu KIH (berencana) menggugat RUU Pilkada karena posisinya di dewan legislatif relatif lemah sehingga khawatir jika Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan oleh anggota DPRD, maka kubu KIH peluang menangnya kecil.

Lantas salakah jika para elit politik memperjuangkan kekuasaan? Bukankah kekuasaan adalah salah satu tujuan dari berpolitik? Inilah yang perlu diperjelas. Jika kekuasaan tersebut dipergunakan untuk memperoleh kewenangan dalam mengatur Negara dalam rangka mencapai masyarakat adil makmur dan sejahtera, maka perjuangan tersebut

telah sesuai. Namun jika kekuasaan tersebut dijadikan prioritas utama sehingga kewajiban moral untuk mensejahterakan rakyat menjadi terpinggirkan, maka yang terjadi adalah elit politik yang haus kekuasaan.

Untuk menentukan apakah kekuasaan tersebut digunakan dengan benar atau tidak sebenarnya cukup mudah. Indikatornya adalah tingkat pendapatan rakyat yang meningkat, pembangunan fasilitas umum dan infra struktur yang memadai, ketersediaan kebutuhan masyarakat (baik sembako maupun BBM) dan penegakan hukum yang konsisten. Selama salah satu dari keempat indikator tersebut masih minus, maka dapat dipastikan telah terjadi kesalahan dalam penggunaan kekuasaan tersebut.

Tidak bisa diukur seberapa jauh kinerja para elit tersebut dalam mewujudkan terpenuhinya keempat indikator tersebut. Memang, dalam kampanye politiknya mereka telah memaparkan visi misinya dalam membangun Negara ini, akan tetapi dengan adanya drama politik yang disuguhkan para elit politik tersebut, perjuangan mereka yang sesungguhnya akan terlihat dari seberapa jauh keempat indikator tersebut dipenuhi.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa rakyat adalah *central issue* sekaligus obyek dari tujuan nasional Negara kita. Dengan kata lain, setiap langkah yang dilakukan oleh elit politik baik dalam wadah eksekutif maupun legislatif semata-mata ditujukan pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, persoalan selanjutnya adalah memahami dan menguji apakah aksi-aksi yang dilakukan oleh elit politik tersebut adalah untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia (pertanyaan kedua kita).

Dengan demikian, aksi gugat menggugat, WO dan saling jejal yang dilakukan oleh para elit politik tersebut tidak dapat dikatakan demi kepentingan rakyat. Apa yang mereka lakukan itu lebih mengarah kepada konsolidasi posisi demi meraih kekuasaan, dimana kekuasaan tersebut belum bisa dinilai apakah akan digunakan untuk mengatur Negara ini dalam rangka mencapai masyarakat adil, makmur dan sejahtera atau, hanya untuk kepentingan parpolnya saja.

Khusus bagi kubu KMP (peraih kursi terbanyak di DPR) yang mengemukakan alasan efisiensi anggaran ketika mengegolkan RUU Pilkada, rakyat menunggu disahkannya produk UU lain yang mampu menghasilkan efisiensi anggaran di bidang lainnya seperti perjalanan dinas anggota DPR dan sebagainya. Demikian pula halnya dengan kubu KIH selaku pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden), yang dulu menyoroti masalah intoleransi dalam penyampaian visi misinya, rakyat pun menanti apakah mampu membuat terobosan yang signifikan.

Terobosan-terobosan seperti disebutkan di atas akan membuktikan konsistensi para elit politik dalam menjalani komitmennya untuk membangun dan mensejahterakan negeri ini. Konsistensi inilah yang akan menepis tuduhan bahwa aksi-aksi yang mereka lakukan hanyalah manuver politik yang licik dan penuh intrik. Jadi, konsistensi harus seimbang dengan komitmen agar memberikan kontribusi yang nyata bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

Akhirnya, setelah kita memahami bahwa yang sesungguhnya diperjuangkan para elit politik adalah kekuasaan, dan bahwa aksi-aksi seperti gugat menggugat, WO dan saling jejal sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai tindakan membela kepentingan rakyat, maka dapatlah kita menjawab bahwa yang benar-benar pro rakyat adalah para elit politik yang berkomitmen secara konsisten untuk mewujudkan peningkatan pendapatan rakyat,

Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

pembangunan fasilitas umum dan infra struktur yang memadai, ketersediaan kebutuhan masyarakat (baik sembako maupun BBM) dan penegakan hukum yang baik.

E. Kesimpulan dan Saran

Komunikasi Politik yang terbangun dalam Kegiatan pemilihan pimpinan DPR RI menjadi bentuk praktek komunikasi satu arah yang berpotensi menyebabkan terbentuknya persepsi negatif masyarakat terhadap keseluruhan kegiatan proses pemilihan pimpinan DPR RI. Citra politik DPR RI baik secara kelembagaan maupun anggota DPR RI menjadi semakin menurun karena hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap DPR RI sebagai lembaga perwakilan.

Perlu upaya yang sistematis untuk membangun kembali citra politik DPR RI yang intinya adalah selalu membangun dan menyediakan mekanisme terbangunya komunikasi dua arah antara DPR RI dengan masyarakat. Meningkatkan kredibilitas komunikator politik melalui peningkatan kinerja Dewan adalah aspek penting dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan ini.

Pesan politik yang dihasilkan komunikator politik adalah benar-benar pesan politik yang sesuai dengan harapan atau kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. Konsistensi Dewan untuk selalu menjaga kinerjanya dengan baik adalah upaya yang signifikan untuk tetap menjaga citra lembaga perwakilan karena dibangun berdasarkan persepsi masyarakat yang didasarkan pada realitas yang terjadi.

Daftar Pustaka

- Effendy, Onong Uchjana. 1993. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Effendy, Onong Uchjana. 2008. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: Rosda Karya.
- Kreitner, Roberto & Kinicki Angelo. 2003. *Organizational Behavior*. Singapore: Mc Graw Hill.
- Liliweri, Alo. 2004. *Wacana Komunikasi Organisasi*. Bandung: CV. Mandar maju.
- Littlejohn, Steven W. 2011. *Theories of Human Communications*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Morissan. 2009. *Teori Komunikasi Organisasi*. Jakarta; Global Indonesia.
- Moleong, Lexx J. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: remaja Rosda Karya.
- Muhammad, Arni. 2002. *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Tirta Wacana.
- Yin, Robert K. 2004. *Studi Kasus, Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo.